

ABSTRAK

Penyediaan lapangan kerja bagi Generasi Z di Kota Tasikmalaya menjadi isu penting mengingat meningkatnya jumlah angkatan kerja muda serta kecenderungan tingginya angka pengangguran terbuka di kelompok usia tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya ditentukan oleh program teknis, melainkan juga oleh dinamika politik yang mengatur distribusi kewenangan dan alokasi anggaran daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana politik distribusi kewenangan dan anggaran berperan dalam penyediaan lapangan kerja bagi Generasi Z di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teori yang digunakan adalah elite Vilfredo Pareto yang membagi faktor politik ke dalam elite singa dan elite rubah, serta konsep politik kewenangan dan anggaran dalam pemerintah daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, analisis dokumen kebijakan, observasi lapangan. Informan terdiri dari DPRD Kota Tasikmalaya, Disnaker, HIPMI, serta perwakilan Generasi Z sebagai penerima kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyediaan lapangan kerja bagi Generasi Z dipengaruhi oleh tiga modal utama yakni modal kewenangan (DPRD dan eksekutif) modal anggaran (alokasi fiskal, pelatihan kerja, program digital skill), serta modal jejaring elite. DPRD sebagai elite singa memainkan peran strategis dalam pengawasan, sementara Disnaker bertindak sebagai elite rubah yang adaptif dalam pelaksanaan program. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana konfigurasi kekuasaan, distribusi anggaran membentuk arah kebijakan ketenagakerjaan daerah serta dampaknya dalam kesiapan kerja Generasi Z.

Kata Kunci: distribusi kewenangan, politik anggaran, generasi Z, Teori Elite Vilfredo Pareto, Kota Tasikmalaya.

ABSTRACT

Providing employment opportunities for Generation Z in Tasikmalaya City has become a crucial issue considering the increasing number of young workers and the high rate of blind unemployment in this age group. This condition indicates that the effectiveness of employment policies is not only determined by technical programs, but also by the political dynamics that regulate the distribution of authority and regional budget allocation. This study aims to examine how the politics of the distribution of authority and budget play a role in providing employment for Generation Z in Tasikmalaya City. This study uses a qualitative approach with a case study method. The theory used is Vilfredo Pareto's elite who divides political actors into elite lions and elite foxes, as well as the political concept of authority and budget in local government. Data collection was conducted through in-depth interviews, policy document analysis, and field observations. Informants consisted of the Tasikmalaya City Regional People's Representative Council (DPRD), the Manpower Office (Disnaker), HIPMI (Indonesian Student Association), and representatives of Generation Z as policy recipients. The results of this study indicate that the provision of employment for Generation Z is influenced by three main capitals: authority capital (DPRD and executive), budget capital (fiscal allocation, job training, digital skills programs), and elite network capital. The Regional People's Representative Council (DPRD), as the lion elite, plays a strategic role in oversight, while the Manpower Office (Disnaker) acts as an adaptive fox elite in program implementation. This research is expected to contribute to understanding how the configuration of power and budget distribution shape the direction of regional employment policy and its impact on Generation Z's job readiness..

Keywords: *distribution of authority, budget politics, generation Z, Vilfredo Pareto's Elite Theory, Tasikmalaya City.*